

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARLI AMIR MAHMUDJI
2. Jabatan : DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN, DAN UMUM
3. NHK : 797834

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.935.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m²/53 m² di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m²/53 m² di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/250 m² di KOTA MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m²/50 m² di KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.435.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 520.000.000

1. MOBIL, HONDA SUV/CRV Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, HONDA SEDAN/CIVIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOBIL, HONDA LCGC/BRIO SATYA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. MOTOR, HONDA SCITIC/BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 27.000.000**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 360.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 6.842.000.000



III. HUTANG

Rp. 3.185.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.657.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.